

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini terbukti dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden yang langsung dipilih oleh rakyat sebagai salah satu contohnya. Pemilu adalah salah satu alat demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil bagi setiap warga negaranya yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih. Setiap warga negara Indonesia yang berada di Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri berhak menyumbangkan hak pilihnya untuk memilih presiden yang menurutnya tepat untuk memimpin negeri ini.

Namun, pada kenyataannya pelaksanaan pemilu di Indonesia masih terdapat beberapa masalah. Masih ada sejumlah warga negara yang memiliki hak untuk memilih namun tidak terdapat sebagai pemilih, sehingga masih banyak warga negara yang tidak terlibat dalam pemilu. Selain itu, hasil dari pelaksanaan pemilu masih ada kecurangan dengan adanya praktik politik uang (*money politic*) pada saat kampanye dan pencoblosan, dan kampanye hitam (*black campaign*) yang bertujuan menyudutkan lawan agar masyarakat terpengaruh untuk tidak memilih lawan calon presiden.

Fenomena lain rendahnya demokrasi di Indonesia baru-baru ini adalah tingkah anggota DPR yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Kericuhan yang terjadi ketika rapat paripurna DPR RI yang pertama kali digelar terkait alat pengesahan kelengkapan dewan yang terjadi pada bulan Oktober 2014 kemarin adalah salah satu contohnya. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR sebagai wakil penyalur aspirasi masyarakat justru malah bertindak anarkis dengan memukul dan membalikkan meja, serta aksi *walk out* dari beberapa anggota DPR yang merasa hak bicaranya diabaikan. Hal ini menjadi contoh buruk bagi generasi muda terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Karakter demokrasi ini sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebab adanya demokrasi ini terdapat pengakuan

dan penghormatan terhadap berbagai perbedaan jenis pengetahuan dan pendapat yang dimiliki setiap orang. Semakin luas keanekaragaman suara yang ada dalam demokrasi, semakin baik pengetahuan yang dapat dibangun. Dalam hal ini, ada pengaruh pendidikan dan sumber daya manusia dengan kemampuan kognitif dalam nilai-nilai demokrasi. Pengaruh tersebut menimbulkan rasa toleransi, kesadaran berpolitik yang baik, rasionalitas, dan partisipasi dari setiap masyarakat.

Pendidikan demokrasi yang diharapkan adalah pendidikan yang nilai-nilai demokrasinya dipelajari lewat pengamalan-pengamalan. Dengan demikian, pembelajaran melalui pengamalan demokrasi (*learning by doing*). Oleh karena itu, sekolah dan lembaga pendidikan lain perlu mendorong tumbuhnya perilaku etis dan tanggung jawab pribadi. Dengan demikian, dalam pembelajaran demokratis, sekolah perlu memberikan fasilitas bagi siswa-siswanya untuk mempunyai kebebasan memilih, kebebasan bertindak, dan kebebasan mendapatkan hasil tindakannya, yang kesemuanya tersebut mengarah kepada pembentukan tanggung jawab pribadi. Terlebih, karakter demokrasi harus dikondisikan keberadaannya, dimanapun kita berada, karena bisa jadi suara orang lain itu berguna bagi kita, se pahit apapun, disadari, tanpa demokrasi, manusia akan kehilangan arah sebab seringkali orang lain lebih tahu dari kita. Jika kita sudah bisa memiliki karakter demokrasi, setiap orang akan hidup terkontrol.

Sebuah bangsa tidak akan mencapai negara yang demokratis jika warga negaranya tidak memiliki keaktifan di dalam pemerintahannya sendiri. Hal ini berarti cita-cita demokrasi hanya bisa terwujud dengan sesungguhnya jika setiap warga negara bisa berpartisipasi aktif dalam pemerintahannya. Guna mencapai negara yang demokratis, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat berarti. Peranan tersebut adalah karakter warga negaranya. Karakter suatu bangsa yang demokratis harus mulai diterapkan sejak usia dini, yaitu ketika masa pendidikan dasar. Jika karakter warga negara sudah dikembangkan pada usia dini maka cita-cita demokrasi yang penuh tantangan ini ke depan bisa diwujudkan.

Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn agar tercapainya tujuan demokrasi di

negara ini dapat terwujud. Guru sebagai perencana, pelaksana dan melakukan penilaian pembelajaran memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai demokratis melalui pengintegrasian karakter demokratis dalam pembelajaran setiap mata pelajaran khususnya PKn.

SMP Negeri 1 Brati merupakan sekolah yang terletak jauh dari pusat kota dan merupakan SMP negeri satu-satunya yang berada di Kecamatan Brati. Pelaksanaan pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati dalam mengimplementasikan karakter demokratis menuntut kreativitas guru PKn dalam setiap pembelajaran yaitu adanya pemberian materi maupun strategi dan metode pembelajaran yang digunakan mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh adanya pengelolaan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn di sekolah dengan judul “Pengelolaan Karakter Demokratis Dalam Pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan”.

B. Rumusan Penelitian

Dalam penelitian ini ada 3 masalah yang perlu dibahas.

1. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1. Perencanaan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan.
2. Pelaksanaan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan.
3. Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter demokratis.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengungkap permasalahan moral siswa yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Dinas Pendidikan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan untuk pengembangan dan peningkatan kreativitas khususnya berhubungan dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter demokratis.
 - b. Bagi kepala sekolah dapat dijadikan landasan dalam meningkatkan motivasi dan supervisi mengenai penerapan pendidikan karakter demokratis dalam pembelajaran PKn.
 - c. Bagi guru dapat dijadikan motivasi untuk menjalankan tugas dengan baik terutama dalam mengajarkan nilai-nilai demokratis dalam setiap kesempatan tidak hanya ketika berada di lingkungan sekolah saja.